

Covid-19, *New Normal* dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia

Muhyiddin¹

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Republik Indonesia

Abstraksi

Pandemi Covid-19 melanda dunia, dan Indonesia termasuk di dalamnya. Indonesia berjuang melawan Covid-19 dengan memodifikasi kebijakan karantina wilayah (*lockdown*) menjadi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang bersifat lokal sesuai tingkat keparahan di wilayah provinsi, kabupaten, atau kota. Selama masa pandemi ini, perekonomian dunia dan Indonesia mengalami pelambatan. Pemerintah dan lembaga kajian strategis memprediksi Indonesia tumbuh rendah atau bahkan negatif di tahun 2020. Untuk itu, Pemerintah berupaya mengagendakan kebijakan Normal Baru agar dampak ekonomi akibat pandemi tidak sampai menimbulkan krisis yang berkepanjangan. Kebijakan ini berhubungan dengan perencanaan pembangunan dimana Pemerintah sudah menetapkan program, target, dan *major projects* di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Pemerintah perlu melakukan penelaahan kembali terhadap rencana jangka menengah mengingat pada tahun 2020 semua program dilakukan pengalihan fokus untuk penanganan Covid-19. Pemerintah mempunyai 3 alternatif dalam perencanaan jangka menengah, apakah tetap dengan rencana semula, melakukan revisi moderat, atau mengganti dengan rencana yang baru dengan mendasarkan asumsi yang sudah diperbaharui dengan datangnya pandemi Covid-19 dan dampak ekonomi yang mengiringinya.

Kata Kunci: perencanaan pembangunan, kebijakan new normal, rpjmn 2020-2024, covid-19

¹ Muhyiddin adalah Perencana Madya di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas Republik Indonesia. E-mail: udyn@bappenas.go.id

Covid-19, *New Normal* dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia

Muhyiddin

I. Pendahuluan

Tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi dunia ketika tiba-tiba muncul wabah Covid-19, yang awalnya muncul secara lokal di Wuhan – China, lalu merebak dan memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian dunia. Data global per 2 Juni 2020 menunjukkan ada 6.140.934 orang dari 216 negara di dunia terkonfirmasi wabah Covid-19 dan 373.548 orang diantaranya meninggal dunia. Sedangkan untuk data Indonesia menunjukkan ada 27.549 orang yang tersebar di 34 provinsi positif Covid-19 dan 1.663 orang diantaranya meninggal dunia. Ketika Covid-19 mulai muncul pada akhir tahun 2019 dan mulai mewabah dan meledak secara lokal di China pada akhir Januari 2020, kemudian merembet ke seluruh dunia sepanjang bulan Februari hingga akhir Mei ini, tidak satupun lembaga think tank dan pemikir strategis dunia (baik dari pemerintahan, swasta, universitas, juga World Bank dan IMF) memperhitungkannya, sehingga *outlook* perekonomian tahun 2020 dan tahun-tahun setelahnya masih diprediksi dengan asumsi normal.

Perkembangan krisis kesehatan yang berdampak pada ekonomi dunia ini praktis membuat seluruh negara di dunia harus mundur dengan rencana-rencana strategis yang telah ditetapkan semula untuk kemudian digantikan kebijakan tanggap darurat dengan memobilisasi semua sumber daya untuk mengatasi wabah Covid-19. Lembaga think tank dan pemikir strategis mengoreksi proyeksinya, terutama tahun 2020 yang kemungkinan akan terjadi pelambatan, resesi, dan bahkan depresi ekonomi. Pembangunan di setiap negara dipastikan terganggu. Masing-masing negara merevisi APBN-nya dan menyediakan alokasi dana yang besar untuk mengatasi wabah corona ini. Mengingat bahwa penyakit yang datang melalui virus corona cukup mematikan (rata-rata sekitar 3-5% kematian dari korban yang telah terpapar virus), lalu obat paten belum ditemukan, maka hanya solusi pencegahan yang menjadi jalan terbaik untuk diupayakan agar masing-masing negara dapat melindungi setiap nyawa warganya.

II. Modifikasi Kebijakan dalam Menghadapi Covid-19

Berbagai negara melakukan kebijakan *lockdown* (dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai karantina wilayah) untuk membatasi penyebaran virus ini secara total. Namun, mengubah perilaku sosial masyarakat bukanlah pekerjaan mudah. Berbagai negara dengan segala keterbatasan mengalami kendala yang tidak sederhana, bahkan di negara-negara maju di Eropa dan Amerika Serikat sangat kewalahan. Kebijakan umum yang mengharuskan masyarakat untuk melakukan *social and physical distancing* (menjaga jarak aman antar individu dan menghindari kerumunan) ternyata bukan sesuatu yang mudah bagi umat manusia di bumi yang sudah terbiasa dengan perilaku sosialnya.

Kebijakan *lockdown* kemudian dimodifikasi sedemikian rupa oleh berbagai negara. Ada yang menerapkan secara penuh, sebagian, atau lokal dan seminimal mungkin.

Indonesia sendiri memodifikasinya dengan nama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan per wilayah, baik provinsi atau kabupaten/kota berdasarkan tingkat keparahan wabah yang penilaiannya ditentukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan. Aturan pelaksanaan PSBB tersebut diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Selain itu aturan mengenai PSBB juga diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. PP dan Keppres tersebut ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 31 Maret 2020.

Dalam PP dan Keppres itu diatur mengenai strategi pemerintah dalam menangani penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. Pada prinsipnya pembatasan tersebut hanya berlaku untuk aktivitas tertentu saja di suatu wilayah yang terduga terinfeksi COVID-19. Tujuannya untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19. Masyarakat masih dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan pembatasan-pembatasan tertentu.

Secara teknis jenis kegiatan masyarakat yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No.9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB sebagai Percepatan Penanganan COVID-19 antara lain meliputi meliburkan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan keamanan. Pemerintah juga menegaskan perbedaan PSBB dengan karantina wilayah dimana masyarakat tidak diperkenankan untuk beraktivitas di luar rumah.

PSBB diterapkan pertama kali di Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta pada tanggal 10 April 2020 dimana Jakarta merupakan episentrum wabah Covid-19 di Indonesia. Jakarta sendiri bersama beberapa kabupaten dan kota di Indonesia sudah melakukan kebijakan darurat wabah Covid-19 secara lokal dengan memberlakukan libur sekolah untuk sekolah negeri dan himbauan untuk sekolah swasta, pembatasan transportasi umum milik pemda, menutup tempat wisata milik pemda, menghimbau agar kantor-kantor baik pemerintah pusat maupun swasta agar melakukan pekerjaan di rumah (*work from home*) dan beberapa kebijakan lain yang masih merupakan lingkup kewenangan pemerintah daerah.

PSBB diberlakukan tidak seragam di Indonesia, salah satu yang berbeda dengan karantina wilayah. Modifikasi kebijakan ini diharapkan dapat tetap menghidupkan perekonomian tetapi dapat optimal dalam memutus rantai penyebaran virus corona.

Kebijakan PSBB secara umum diterapkan melalui perluasan pemberlakuan libur sekolah baik negeri maupun swasta, menutup tempat-tempat wisata/hiburan dan perbelanjaan secara keseluruhan, menerapkan kebijakan bekerja di rumah untuk kantor-kantor yang bukan termasuk sektor penting, serta pembatasan lainnya yang diperlukan dalam memutus penularan wabah corona ini.

III. Dampak Terhadap Perekonomian

Berbagai laporan dari lembaga studi yang menganalisis dampak Covid-19 menyatakan bahwa akan terjadi pelambatan ekonomi dunia di tahun 2020 ini, tidak terkecuali Indonesia.

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD, 2020) menyebutkan bahwa Covid-19 memukul negara-negara berkembang pada saat mereka sedang berjuang dengan beban utang yang tidak berkelanjutan selama bertahun-tahun. Pada akhir 2018 total stok utang negara-negara berkembang mencapai 191 persen (atau hampir dua kali lipat) PDB gabungan mereka, level tertinggi yang pernah tercatat. Krisis utang negara berkembang, yang sudah berlangsung sebelum guncangan Covid-19, memiliki dua hal yang patut dikedepankan dalam konteks perdebatan tentang pengurangan utang untuk negara berkembang setelah guncangan Covid-19. *Pertama*, krisis utang yang sedang berlangsung tidak terbatas pada negara-negara berkembang yang termiskin saja, tetapi juga berpengaruh pada semua kategori pendapatan. *Kedua*, pada umumnya, tidak disebabkan oleh salah urus ekonomi di dalam negeri, tetapi oleh salah urus ekonomi dan keuangan di tingkat global.

UNCTAD menambahkan bahwa kerapuhan posisi utang negara berkembang sebelum krisis Covid-19 semakin meningkat karena perubahan yang bersamaan dengan

kepemilikan dan denominasi mata uang dari utang swasta dan publik mereka. Dengan demikian, pasar obligasi domestik semakin dalam dimasuki oleh investor asing.

Indonesia juga tidak luput akan adanya kemungkinan terjebak pada bahaya defisit anggaran yang tidak berkelanjutan. Ketika Covid-19 mulai merebak di Indonesia, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Virus Corona. Pada Pasal 2 Perpu tersebut, pemerintah dimungkinkan untuk merelaksasi pembatasan defisit anggaran lebih dari 3 persen. Disebutkan di pasal tersebut bahwa batasan defisit anggaran boleh melampaui 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022.

Lembaga konsultan McKinsey pada akhir Maret 2020 menerbitkan laporan mengenai dampak Covid-19 pada dunia bisnis. Berikut adalah beberapa hal penting yang dijelaskan McKinsey dalam laporan mereka antara lain: *pertama*, Covid-19 adalah bencana besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berbagai laporan menyebutkan bahwa bencana wabah terbesar sebelumnya terjadi satu abad yang lalu, sekitar tahun 1918-1920 dimana wabah *Spanish influenza* menyerang dunia dengan korban meninggal dunia diperkirakan antara 50 – 100 ribu jiwa.

Kedua, tentang model penanganan, China adalah paling banyak dirujuk mengingat Covid-19 ini muncul pertama kali di wilayah China dimana pemerintahnya memberlakukan kebijakan karantina wilayah secara ketat di hampir semua kota yang terjangkit, terutama di wilayah Wuhan. Model berikutnya adalah Korea Selatan yang memilih karantina wilayah secara parsial namun dengan dibarengi tes massal yang sangat agresif, disertai pelacakan kontak, isolasi dan karantina terhadap mereka yang positif Covid-19 dengan pemantauan yang sangat ketat.

Ketiga, tentang bagaimana meramu strategi yang tepat dalam dua hal yang sangat bertentangan, yaitu menyelamatkan banyak nyawa dengan karantina yang ketat, tetapi di sisi lain harus tetap memprioritaskan untuk menyelamatkan perekonomian dari guncangan dampak Covid-19.

Keempat, kapitalisasi pasar pada kuartal pertama ini adalah yang terburuk dalam sejarah dan masih akan terpuruk dalam jangka waktu yang belum dapat diprediksi. Beberapa sektor bisnis, terutama minyak dan gas, transportasi udara, perawatan kesehatan, dan keuangan akan mengalami pertumbuhan negatif yang cukup lama, dan kemungkinan baru akan pulih paling cepat setelah tahun 2021 atau 2 tahun setelah pandemi Covid-19 ini.

Lebih khusus tentang dampak pada sektor ketenagakerjaan, Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (ILO) menerbitkan *ILO Monitor 2nd edition* pada April 2020 dimana laporan ini menguraikan beberapa hal penting menyangkut dampak Covid-19 terhadap kondisi ketenagakerjaan seluruh dunia, antara lain: *pertama*, kebijakan karantina wilayah di berbagai negara berdampak pada 2,7 miliar pekerja (81 persen dari total pekerja di seluruh dunia).

Kedua, kontraksi ekonomi secara langsung mempengaruhi penyempitan lapangan kerja. Perhitungan ILO per 1 April 2020 menunjukkan penurunan jam kerja sebesar 6,7 persen pada kuartal kedua 2020 atau setara dengan hilangnya 195 juta pekerjaan penuh waktu.

Ketiga, perhitungan total kehilangan pekerjaan pada tahun 2020 tergantung pada perkembangan pandemi ini, bagaimana pemerintah masing-masing negara mengantisipasi, serta penemuan obat dan vaksin sehingga diketahui kepastian

berakhirnya pandemi. ILO akan terus memantau dan diperkirakan bahwa jumlah orang yang menganggur sampai laporan ini dibuat meningkat sebesar 24,7 juta dari angka tahun 2019 188 juta.

Keempat, ada beberapa sektor tertentu yang menjadi penyumbang mayoritas hilangnya pekerjaan dan penurunan jam kerja. Perkiraan ILO menunjukkan bahwa sekitar 1,25 miliar pekerja atau 38 persen dari total pekerja terancam akan diberhentikan yang meliputi sektor perdagangan ritel, akomodasi dan makanan, dan manufaktur.

Kelima, khususnya di negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah, sektor-sektor yang terkena dampak besar umumnya memiliki proporsi pekerja informal yang tinggi dimana para pekerjanya tidak memiliki jaminan sosial, atau punya tetapi dalam keadaan minimal. Para pekerja ini kini berada dalam kondisi paling rentan di antara kelompok pekerja lainnya.

Keenam, pekerja di sektor kesehatan sangat rentan terhadap paparan risiko kesehatan dan risiko ekonomi. Walaupun belum ada angka seluruh dunia yang resmi, berbagai laporan menunjukkan besarnya korban pada para tenaga kesehatan terutama yang berhubungan langsung dengan pandemi Covid-19.

Ketujuh, respon kebijakan harus diarahkan ke bantuan segera untuk pekerja dan sektor-sektor usaha tertentu untuk melindungi mata pencaharian. Terutama di negara-negara berkembang dan di sektor-sektor tertentu dengan dampak yang signifikan. Dengan demikian, ketika pandemi berlalu, negara dapat memulihkan ekonomi lebih cepat.

Economist Intelligence Unit (2020), lembaga pemikir strategis dari The Economist, menerbitkan analisis dengan kesimpulan bahwa Covid-19 akan membuat hampir semua negara Group 20 (G-20) masuk ke jurang resesi. Analisis ini terbit pada akhir Maret 2020. Gambaran suasana ekonomi global tampak suram karena jika resesi terjadi pada anggota G-20 maka efek dominonya akan membuat pelambatan ini menyebar ke seluruh dunia. Meskipun diasumsikan bahwa pemulihan akan terjadi pada paruh kedua tahun 2020, risiko pandemi gelombang kedua dan ketiga akan semakin memperburuk gambaran proyeksi ekonomi global paling tidak untuk jangka menengah.

Tekanan untuk menerapkan kebijakan karantina wilayah di setiap negara dipastikan akan meningkat, yang berarti ketidakpastian ekonomi akan cenderung naik dan membuat pelambatan ekonomi baik secara gradual maupun drastis. Semua negara akan berhadapan dengan kondisi dimana pendapatan negara turun, tetapi di sisi lain negara membutuhkan peningkatan pengeluaran negara yang sangat tinggi untuk berbagai kebutuhan penanganan Covid-19. Keadaan ini akan membuat banyak negara masuk dalam krisis utang yang berkepanjangan.

Jika merujuk proyeksi Economist Intelligence Unit, Indonesia (bersama dengan India dan Cina) diprediksi masih relatif beruntung dapat mencapai tingkat pertumbuhan yang positif. Sementara wilayah Eropa adalah daerah yang paling parah terkena dampaknya. Namun mengingat analisis ini dilakukan pada masa awal pandemi maka prediksi ini terlalu prematur untuk menumbuhkan optimisme karena diperkirakan tidak akan ada negara yang mampu menghela pertumbuhan ekonominya di tahun 2020 ini.

Lembaga berikutnya adalah Bank Dunia yang menerbitkan laporan tentang ekonomi Asia Timur dan Pasifik pada masa awal pandemi Covid-19. Bank Dunia (2020) menyajikan proyeksi dimana negara-negara Asia-Pasifik akan berada dalam kondisi yang sangat buruk. Khusus Indonesia, diproyeksikan ekonomi Indonesia akan tumbuh di kisaran 2,1 persen dan negatif 3,5 persen (prediksi paling skeptis sejauh ini). Vietnam diperkirakan sebagai negara yang paling tangguh dan masih mampu mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi secara positif.

Indonesia diprediksi pada tahun 2020 ini akan didominasi oleh prospek ekonomi yang memudar, dimana pelambatan ini sudah diprediksi sebelum pecahnya Covid-19. Covid-19 membuat perekonomian Indonesia lebih dalam terpuruk. Tingkat kemiskinan diperkirakan akan menurun, tetapi proporsi orang yang rentan (tanpa jaminan ekonomi) akan sangat meningkat. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan melemah secara signifikan pada 2,1 persen (paling optimis) hingga minus 3,5 persen pada tahun 2020 sebelum kembali ke rata-rata 5,4 persen pada tahun 2021-2022 ketika permintaan agregat telah pulih.

Chang Yong Rhee (2020) dari International Monetary Fund (IMF)² sebagaimana dikutip Kompas, memprediksi secara lebih moderat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 akan tumbuh di angka 0,5 persen, tidak seperti Bank Dunia yang memprediksi dengan rentang asumsi optimis (2,1 persen) dan pesimis (minus 3,5 persen). Lebih lanjut diuraikan bahwa secara teori Indonesia berpeluang mempunyai pertumbuhan ekonomi pasca krisis 2020 dengan angka yang cukup tinggi, IMF memprediksi hingga 8,2 persen di tahun 2021. Prediksi tersebut diiringi dengan asumsi bahwa pemerintah dapat menangani Covid-19 dengan kecepatan dan ketepatan yang sangat tinggi dan level 8,2 persen pada 2021 ini adalah proyeksi yang paling optimistis. Negara-negara di ASEAN ataupun dunia, termasuk Indonesia, dihadapkan pada dua asumsi risiko. Risiko tekanan ekonomi akibat Covid-19 akan menurun jika vaksin segera ditemukan (*upside risk*). Sementara risiko tekanan ekonomi semakin dalam jika jumlah kasus Covid-19 terus meningkat pada triwulan II-2020 (*downside risk*).

Rhee juga menyampaikan bahwa kondisi perekonomian yang saat ini sedang dihadapi saat ini jauh berbeda dengan krisis keuangan global pada 2008-2009, atau situasi krisis-krisis ekonomi sebelumnya. Perekonomian yang diperkirakan tumbuh nol persen lebih dikarenakan sangat menurunnya aktivitas sektor riil, terutama sektor jasa, pariwisata, dan penerbangan. Sektor-sektor tersebut, sejalan dengan analisis McKinsey, mendapat tekanan paling kuat akibat penyebaran Covid-19. Di sisi lain, Rhee menggambarkan bahwa tekanan pertumbuhan ekonomi negara-negara maju jauh lebih parah dibanding negara-negara berkembang di Asia. Pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini diprediksi IMF akan mencapai minus 3 persen. Mitra dagang utama Asia mengalami kontraksi cukup dalam, yaitu Amerika Serikat minus 5,9 persen dan kawasan Eropa minus 7,5 persen.

Kementerian Keuangan melalui Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Nathan Kacaribu (2020), menyatakan bahwa pemerintah merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 ini pada rentang angka 2,3 persen dan minus 0,4 persen, sedikit lebih tinggi dari proyeksi optimis Bank Dunia 2,1 persen dan untuk pesimis Bank Dunia memprediksi di angka minus 3,4 persen.³ Detil proyeksi lebih mikro dimana pertumbuhan triwulan I-2020 masih berkisar 4,5 - 4,6 persen, sedangkan pada triwulan II-2020 masuk dalam rentang nol persen hingga minus 2 persen. Dampak pandemi Covid-19 mempengaruhi hampir semua aktivitas domestik sejak awal Maret 2020.

Lebih lanjut Kacaribu menjelaskan bahwa saat ini Indonesia menghadapi masa sulit dengan tingkat ketidakpastian yang belum bisa diprediksi. Perekonomian global dan nasional dipastikan melambat signifikan. Titik kritis dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia diperkirakan terjadi selama April-Juni 2020. Kondisi ini juga seiring dengan semakin banyak daerah yang menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Lebih lanjut diungkapkan Febrio bahwa pembatasan sosial berskala besar akan menggerus konsumsi rumah tangga, yang berkontribusi 54-55 persen terhadap

² Direktur Departemen Asia dan Pasifik Dana Moneter Internasional (IMF) Chang Yong Rhee menjawab pertanyaan Kompas dalam konferensi pers regional Asia dan Pasifik yang diselenggarakan secara virtual dari Washington DC, Amerika Serikat, Kamis (16 April 2020) malam WIB.

³ Kompas mengutip Febrio Nathan Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan dalam diskusi "Indonesia Macroeconomic Update 2020" yang diselenggarakan secara virtual, Senin (20 April 2020), di Jakarta.

pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kegiatan dunia usaha juga akan menurun sehingga berpotensi meningkatkan kasus pemutusan hubungan kerja dan pengurangan jam kerja. Sebagai solusi jangka pendek, untuk memperkecil tekanan, pemerintah mempercepat pencairan bantuan sosial secara bertahap mulai April. Stimulus bagi dunia usaha juga diperluas dan diberlakukan pada awal April. Selain itu, suntikan stimulus baru disiapkan untuk menyelamatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari kebangkrutan. Stimulus ekonomi juga akan diarahkan untuk mendukung penduduk rentan miskin yang di atas 20 persen dan pengusaha menengah ke bawah.

IV. *New Normal* dan Kebijakan Penyesuaian PSBB

Indonesia telah melaksanakan masa tanggap darurat penanganan covid sejak awal Maret 2020, kemudian disusul modifikasi kebijakan karantina wilayah menjadi PSBB dimulai pada 10 April 2020 di Jakarta, kemudian disusul beberapa kota satelit Jakarta, lalu diikuti wilayah lain dalam lingkup provinsi, kabupaten, atau kota yang menunjukkan kecenderungan peningkatan kasus secara signifikan. Walaupun kebijakan PSBB tidak dilaksanakan serentak ke seluruh wilayah, dampaknya terhadap sosial ekonomi masyarakat tetap terasa se-Indonesia.

Praktis setelah 3 bulan melewati masa tanggap darurat dan PSBB, pemerintah Indonesia mulai menjajaki penerapan kehidupan normal yang baru (*new normal*) dan melonggarkan PSBB.

Pada 28 Mei 2020 Pemerintah Pusat melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas pada 28 Mei 2020 dalam *jumpa pers* bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Tim Pakar Gugus Tugas Penanganan Covid-19 menyampaikan Protokol Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 menuju Normal Baru (*new normal*), hidup berdampingan dengan Covid-19. Pemerintah menyebutnya 'Penyesuaian PSBB', dimana sedang disusun kriteria dan langkah-langkahnya, serta menentukan bagaimana Penyesuaian PSBB diberlakukan. Monoarfa menjelaskan bahwa berdasarkan berbagai studi tentang pengalaman berbagai negara yang berhasil menangani pandemi Covid-19, ada beberapa prasyarat agar masyarakat dapat produktif tetapi keamanan dari bahaya Covid-19 tetap terjamin, yaitu: 1) penggunaan data dan ilmu pengetahuan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk Penyesuaian PSBB; 2) Penyesuaian PSBB dilakukan secara bertahap dan memperhatikan zona; 3) Penerapan protokol kesehatan yang ketat; dan 4) *Review* pelaksanaan Penyesuaian PSBB yang dimungkinkan adanya pemberlakuan kembali PSBB dengan efek jera yang diberlakukan secara ketat apabila masyarakat tidak disiplin dalam beraktivitas.

Dalam rilis pers tersebut diuraikan juga tentang kesulitan pemerintah memberlakukan pembatasan sepenuhnya, sementara roda perekonomian harus tetap berjalan. Pertumbuhan ekonomi kuartal I 2020 sudah menunjukkan kinerja menurun di 2,97 persen. Pemerintah perlu mengedukasi masyarakat tentang normal baru sedini dan semaksimal mungkin, setidaknya sampai vaksin dan obat Covid-19 tersedia atau kasus Covid-19 dapat ditekan menjadi sangat kecil. Protokol kesehatan juga harus diterapkan dengan disiplin yang ketat dalam setiap kegiatan sehari-hari.

Monoarfa menyampaikan bahwa Indonesia berpatokan pada tiga kriteria yang direkomendasikan WHO dalam membuat keputusan Penyesuaian PSBB. Kriteria pertama adalah **epidemiologi**, yaitu Angka Reproduksi Efektif (R_t) menunjukkan rata-rata jumlah orang yang terinfeksi oleh satu orang yang terinfeksi. Ketika $R_t = 2,5$ berarti satu orang yang terinfeksi dapat menularkan virus ke 2-3 orang lainnya. Diharapkan $R_t < 1$ selama dua minggu berturut-turut, artinya, walaupun virus masih ada tetapi penyebaran virus sudah dapat dikendalikan. Metode ini diadopsi berbagai negara, antara lain Amerika Serikat dan 54 negara bagiannya serta Inggris dan Jerman. R_t juga sangat dipengaruhi *physical distancing*.

Studi di Inggris yang berjudul “*Quantifying the Impact of Physical Distance Measures on the Transmission of Covid-19 in the UK*” menemukan pengurangan 74 persen kontak harian rata-rata dapat mengurangi Rt dari angka 2,6 ke 0,62.

Kriteria kedua adalah sistem kesehatan, yaitu rasio jumlah tempat tidur rumah sakit untuk perawatan dibandingkan jumlah kasus yang memerlukan perawatan $> 1,2$. Sistem kesehatan mencakup tenaga kesehatan, peralatan, dan tempat tidur, mampu menangani peningkatan kasus Covid-19 ≥ 20 persen dari kapasitas saat ini. Misalnya rata-rata jumlah kasus baru harian adalah 100, maka paling sedikit 120 tempat tidur rumah sakit yang dibutuhkan untuk pasien Covid-19. Selain itu, direkomendasikan juga menyediakan IGD dan ruang isolasi, APD, serta petugas medis yang cukup.

Kriteria ketiga adalah *surveilans*, artinya jumlah tes per 1 juta penduduk ≥ 3.500 . WHO merekomendasikan untuk melakukan tes mingguan 1 orang dari setiap 1.000 orang per minggu dimana Indonesia perlu menerapkan 270 ribu tes Covid-19 per minggu. Namun pemerintah dapat merasionalisasikan jumlah tes yang diperlukan dengan kondisi dan kebutuhan lapangan. Di tingkat daerah, DKI Jakarta telah melakukan 132 ribu tes, dimana angka tersebut melebihi 50 persen dari batas yang diperlukan. Namun secara nasional Indonesia masih harus melakukan lebih banyak tes dengan meningkatkan kapasitas laboratorium dan kesadaran masyarakat untuk tes mandiri.

Catatan berikutnya dari pemerintah adalah tantangan untuk mendorong *contactless society* dan *cashless society* sebagai salah satu upaya pengendalian virus di Indonesia. Merujuk pada Korea Selatan dimana teknologi digital dan robot banyak digunakan untuk mengurangi kontak dengan orang. Sementara pemerintah Jepang juga telah merilis 10 langkah untuk mengurangi kontak sosial, seperti mendorong belanja *online*, memakai masker, serta bekerja dari rumah kecuali untuk layanan dasar.

Pemerintah belum menetapkan waktu yang pasti kapan pelaksanaan kebijakan Penyesuaian PSBB akan diberlakukan. Berbagai spekulasi waktu bermunculan dari beberapa lembaga pemerintah yang mestinya dapat dikoordinasikan dengan baik agar tidak menjadi spekulasi di dalam masyarakat. Namun ketidakpastian *timeline* juga membuat masyarakat abai terhadap kedisiplinan yang sebenarnya tetap harus terjaga.

Namun Panji Hadisoemarto (2020), epidemiolog Universitas Padjadjaran dalam artikelnya yang dipublikasikan Majalah Tempo (30/05/2020) mengingatkan tentang risiko ledakan kasus Covid-19 yang akan selalu ada. Sebabnya ada dua hal, yaitu: (1) kasus yang menjadi sumber penularan; dan (2) orang rentan yang menjadi sasaran penularan. Menurut Hadisoemarto, kerentanan populasi akan bahaya Covid-19 belum akan berkurang secara signifikan kecuali jika ada perkembangan drastis tentang ditemukannya vaksin dan setidaknya digunakan oleh 60 persen populasi rentan. Contoh kasus Swedia yang diklasifikasikan menerapkan strategi *herd immunity* baru mencakup sekitar 7 persen dari populasi Kota Stockholm yang memiliki respon antibody terhadap Covid-19. Membaca dua hal tersebut maka kebijakan Normal Baru atau Penyesuaian PSBB akan sangat mungkin untuk dikembalikan kepada PSBB, atau bahkan kebijakan yang lebih kuat dari PSBB.

Sejalan dengan pemerintah dan WHO, Hadisoemarto menambahkan tentang kebutuhan akan sistem *surveilans* dan pemeriksaan laboratorium yang kuat. Sementara dengan kapasitas Indonesia yang sangat terbatas dalam menghadapi virus yang serba baru ini, dimana negara-negara maju dengan sistem kesehatan yang kuat juga kewalahan, perlu disadari bahwa hidup normal baru bukanlah hidup berdampingan, apalagi berdamai dengan Covid-19. Hidup normal baru adalah kehidupan dimana manusia selalu dihadapkan adanya ancaman Covid-19.

V. Perencanaan Pembangunan Indonesia

Wabah corona memaksa semua negara untuk merevisi perencanaan pembangunan mereka. Target disesuaikan secara realistis, asumsi diubah sesuai keadaan sekarang, dan prioritas program jangka pendek dialihkan sebagian besar untuk mengatasi epidemic Covid-19. Sementara kebijakan pembangunan padat modal seperti infrastruktur dilakukan moratorium dan akan dikaji untuk dilaksanakan kembali setelah periode tanggap darurat Covid-19 dinyatakan berakhir.

Dampak sosial dan ekonomi yang melanda Indonesia akibat pandemi ini memaksa semua level pemerintahan baik pusat dan daerah untuk melakukan koreksi terhadap rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Terutama yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran mengingat pada saat menyusun sama sekali tidak memperhitungkan pandemi. Penyesuaian yang tepat dan kebijakan yang terukur dalam menangani wabah corona akan menjadi titik awal untuk pemulihan.

Pemerintah Indonesia sendiri baru merampungkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 ketika pandemi Covid-19 mulai menyebar ke seluruh dunia, yang dituangkan Peraturan Presiden No. 18 tahun 2020 pada tanggal 14 Februari 2020. Dokumen yang menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan untuk masa 5 tahun ke depan itu disusun ketika Indonesia belum punya catatan kasus Covid-19, sehingga seluruh asumsi yang melandasinya berdasarkan keadaan normal.

Pada periode 2020 – 2024 ini Indonesia mempunyai target-target besar yang direncanakan untuk mengejar kenaikan kelas sebagai salah satu negara berpendapatan menengah dan berakselerasi meninggalkan *middle income country trap* (jebakan negara berpendapatan menengah).⁴ Disamping itu Indonesia juga sedang berusaha keras menyeimbangkan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan wilayah, baik antara Jawa dan luar Jawa, juga antara Kawasan Barat dan Timur Indonesia, mengingat di kawasan yang lebih miskin (luar Jawa dan Kawasan Timur) ternyata menyimpan potensi besar yang selama ini tidak tergarap dengan baik. Pada periode ini juga Pemerintah Indonesia merencanakan membangun calon Ibu Kota Negara (IKN) baru untuk menggantikan Jakarta dengan lokasi di Provinsi Kalimantan Timur.

RPJMN 2020-2024 ditetapkan dengan mengusung visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Kemudian diterjemahkan dalam tujuh agenda pembangunan, yaitu (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, (3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, dan (7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Selain itu, sejumlah sasaran pembangunan jangka menengah juga akan ditargetkan akan dicapai pada 2024, antara lain: (i) Tingkat Kemiskinan pada kisaran 6,0 – 7,0 persen; (ii) Pertumbuhan ekonomi 6,0 persen; (iii) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75,54; (iv) Gini rasio mencapai 0,360 – 0,374; (v) Tingkat pengangguran terbuka (TPT) 3,6 – 4,3 persen; dan (vi) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju target 29 persen di 2030 (*Paris Agreement*).

⁴ Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat membuka rapat yang dihadiri seluruh Sekjen/Sesmen/Sestama Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga, Dirjen/Deputi terkait di lingkungan Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan BKPM, seluruh Kepala Bappeda Provinsi, dan para pejabat di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas, Senin (24 Februari 2020).

Terdapat 42 proyek prioritas strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Proyek prioritas strategis tersebut merupakan proyek terintegrasi, baik dari kementerian/lembaga (K/L), maupun integrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan masyarakat. Proyek prioritas ini diharapkan memiliki daya ungkit tinggi sehingga disebut *major projects*. Proyek prioritas strategis dimaksud antara lain delapan destinasi pariwisata unggulan, mencakup Danau Toba, Borobudur DSKT, Lombok, Labuan Bajo, Bromo-Tengger-Semeru, Wakatobi, Likupang, dan Revitalisasi Bali. Program berikutnya tentang percepatan penurunan kematian ibu dan *stunting*, serta percepatan pembangunan kawasan tertinggal wilayah adat Papua mencakup wilayah adat Laa Pago dan Domberay. Sementara untuk program pembangunan infrastruktur, meliputi Jalan Tol Trans Sumatera-Lampung, kereta api kecepatan tinggi di Pulau Jawa, kereta api Makassar-Pare Pare, serta jaringan pelabuhan utama terpadu di Belawan dan Pelabuhan Kijing.

Selanjutnya, *major projects* pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0 serta pembangunan *science techno park*. Manfaat proyek ini untuk meningkatkan pekerja yang berada pada bidang pekerjaan berkeahlian menengah dan tinggi dari 39,57 persen pada 2018, menjadi 50 persen pada 2024, kemudian meningkatnya lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat kompetensi dari 472.089 orang pada 2017 menjadi 2 juta orang pada 2024.

Dalam rangka percepatan pembangunan di 62 daerah tertinggal yang telah ditetapkan menargetkan sebanyak 25 daerah tertinggal direncanakan akan keluar dari klasifikasi daerah tertinggal di tahun 2024. Skenario rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan meningkat dari 58,82 di tahun 2019 menjadi sekitar 62,2–62,7 pada 2024. Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal juga dibidik menurun dari 25,82 persen di 2019 menjadi 23,5–24 persen di 2024. 62 daerah tertinggal tersebut tersebar di 5 pulau besar yaitu Pulau Sumatra, Pulau Sulawesi, Pulau Maluku-Nusa Tenggara dan Pulau Papua dengan distribusi di berbagai provinsi, yakni 22 kabupaten di Provinsi Papua, 8 kabupaten di Papua Barat, 13 kabupaten di Nusa Tenggara Timur, 1 kabupaten di Nusa Tenggara Barat, 6 kabupaten di Maluku, 2 kabupaten di Maluku Utara, 3 kabupaten di Sulawesi Tengah, 4 kabupaten di Sumatra Utara, 1 Kabupaten di Sumatra Barat, 1 kabupaten di Sumatra Selatan dan 1 Kabupaten di Lampung. Jumlah ini jauh turun dari total 122 kabupaten yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal dalam periode sebelumnya.

Ada tiga kebijakan pembangunan yang dipilih dan menjadi strategi terpadu percepatan pembangunan daerah dalam RPJMN 2020-2024. *Pertama*, percepatan pembangunan daerah diletakkan dalam dua pendekatan koridor, yakni koridor pertumbuhan yang menekankan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dengan basis keunggulan wilayah yang dapat meningkatkan nilai tambah, devisa, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi wilayah serta koridor pemerataan yang mendorong pengembangan wilayah penyangga (*hinterland*) di sekitar pusat pertumbuhan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat sesuai prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs), yakni tidak meninggalkan satu pun kelompok masyarakat atau *no one left behind*.

Kedua, pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan afirmatif untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal, kecamatan lokasi prioritas perbatasan, dan pulau-pulau kecil terluar dan terdepan. Pola afirmatif diarahkan untuk perluasan akses pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana perumahan, air bersih dan sanitasi, listrik, peningkatan konektivitas dan pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi sebagai basis ekonomi digital, juga perluasan kerja sama dan kemitraan dalam investasi, promosi, pemasaran, dan perdagangan.

Ketiga, pembangunan desa terpadu sebagai pilar penting dari percepatan pembangunan 62 daerah tertinggal dalam periode lima tahun ke depan. Sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mendukung RPJMN 2020-2024 Prioritas Nasional 2 yaitu Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, maka Kementerian PPN/Bappenas melakukan *mainstreaming* 62 daerah tertinggal sebagai lokasi prioritas daerah afirmasi. Berbagai program pembangunan yang dibiayai dari skema anggaran kementerian/lembaga maupun dari skema Dana Alokasi Khusus (DAK) diarahkan untuk fokus memprioritaskan daerah afirmasi sebagai bentuk keberpihakan pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan 62 daerah tertinggal. Strategi percepatan pembangunan 62 daerah tertinggal juga akan mengoptimalkan kerangka kebijakan *Major Projects*.

VI. Penutup

Disain perencanaan jangka menengah tersebut kini harus mengalami berbagai pergeseran ketika tahun 2020, tahun awal periode RPJMN, difokuskan pada penanganan covid-19. APBN 2020 difokuskan untuk mitigasi Covid-19 agar dampak ekonomi dan sosial akibat virus ini dapat diminimalkan sampai keadaan bisa segera pulih. Penanganan pandemi Covid-19 mengubah rencana dan strategi pembangunan berbagai sektor yang telah dipersiapkan Pemerintah Indonesia, salah satunya target pembangunan yang berubah seiring dengan perubahan proses kerja.

Perencanaan pembangunan pasca covid-19 merupakan tantangan berat bagi seluruh negara di dunia. Kehidupan normal baru masyarakat dimana sampai saat ini belum ada obat paten untuk menyembuhkan covid-19 dan juga vaksin untuk mencegahnya menjadikan bahwa hal yang pasti kalau masyarakat dunia akan hidup bersama covid, atau dalam istilah lugas Panji Hadisoemarto adalah hidup dalam ancaman covid-19 setiap saat.

Indonesia harus dapat menyusun skenario sendiri dengan asumsi bahwa obat paten dan vaksin baru akan lama ditemukan, dan yang pasti tidak akan terjadi dalam jangka pendek. Bagaimana menggerakkan ekonomi ketika kehidupan normal baru memerlukan perubahan budaya yang sangat drastis akan perilaku masyarakat. Pemerintah memberikan panduan bagaimana kehidupan normal baru yang harus dilakukan masyarakat dalam 7 norma, yaitu: (1) Cuci tangan; (2) Hindari menyentuh wajah Menghindari menyentuh area wajah; (3) Menerapkan etika batuk dan bersin saat batuk atau bersin karena tubuh akan mengeluarkan virus dari dalam tubuh; (4) Gunakan masker saat keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain; (5) Jaga jarak sosial Agar terhindar dari paparan virus; (6) Isolasi mandiri. Ini dilakukan bagi yang merasa tidak sehat, seperti memiliki beberapa gejala sakit, yakni demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan atau sesak napas; dan (7) Menjaga kesehatan dengan memastikan kesehatan fisik, berjemur sinar matahari pagi, mengonsumsi makanan bergizi, dan melakukan olahraga ringan.

Untuk skenario perencanaan pembangunan jangka menengah pada masa kehidupan normal baru ini Pemerintah mempunyai 3 alternatif pilihan strategi. *Pertama*, tetap dengan rencana semula yang sudah tertuang dalam RPJMN 2020-2024, dengan sedikit penyesuaian program untuk mengakomodir kehidupan normal baru dalam ancaman Covid-19.

Kedua, melakukan penyesuaian program dan target secara moderat dengan mendasarkan asumsi yang sudah diperbaharui sesuai situasi dan kondisi pandemi Covid-19, kemudian mempertahankan program dimana asumsi-asumsi yang menjadi dasar masih relevan dan masih bisa disesuaikan dengan keadaan pasca Covid-19.

Ketiga, merombak seluruh program dan target-target yang ditetapkan berdasarkan berbagai asumsi dan perkembangan baru pasca Covid-19 dan krisis ekonomi yang mengiringinya. Dalam hal ini semua program yang telah ditetapkan di RPJMN 2020-2024 dikaji ulang, dirumuskan kembali strateginya, dan dijadwal ulang periode pelaksanaannya.

Pada perombakan ini Pemerintah perlu memasukkan unsur revolusi budaya dimana protokol kesehatan bersama Covid-19 harus menjadi panduan hidup masyarakat Indonesia dalam jangka menengah, bahkan jangka panjang.

Referensi

- Economist Intelligence Unit. (2020). *The next calamity: The coronavirus could devastate poor countries*. <https://www.economist.com/leaders/2020/03/26/the-coronavirus-could-devastate-poor-countries>. Dipublikasikan The Economist pada 26 Maret 2020, dan diakses pada tanggal 30 Mei 2020.
- McKinsey and Company. (2020). Covid-19 Briefing Note: Global Health and Crisis Response. <https://www.mckinsey.com/featured-insights/coronavirus-leading-through-the-crisis>. Dipublikasikan 25 Maret 2020.
- Muhyiddin, & Dharendra Wardhana. (2020). *Covid-19 Outbreak and Development Planning in Indonesia*. *The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(1). <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i1.108>.
- Panji Hadisoemarto. (2020). *Preokupasi R(T) dan Hidup Zaman Normal Baru*. <https://majalah.tempo.co/read/kolom/160591/kolom-statistik-rt-dan-penggunaannya-dalam-kebijakan-publik-tentang-normal-baru>. Dipublikasikan Majalah Tempo edisi 30 Mei 2020, diakses pada tanggal 30 Mei 2020.
- World Bank. 2020. "East Asia and Pacific in the Time of COVID-19" East Asia and Pacific Economic Update (April), World Bank, Washington, DC. Doi: 10.1596/978-1-4648-1565-2. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO
- World Health Organization (WHO). (2020). *Public health criteria to adjust public health and social measures in the context of COVID-19*, <https://www.who.int/publications-detail/public-health-criteria-to-adjust-public-health-and-social-measures-in-the-context-of-Covid-19>. Dipublikasikan 12 Mei 2020, diakses pada tanggal 30 Mei 2020.
- United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2020). *From the Great Lockdown to the Great Meltdown: Developing Country Debt in the Time of Covid-19*, https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/gdsinf2020d3_en.pdf. Dipublikasikan tanggal 23 April 2020, diakses pada tanggal 30 Mei 2020.

Berita Online

- Bappenas Official Website. 25 Februari 2020. *Rencana Kerja Pemerintah 2021: Penguatan Industri, Pariwisata, Dan Investasi Diusung*. <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/rencana-kerja-pemerintah-2021-penguatan-industri-pariwisata-dan-investasi-diusung/>. Diakses pada tanggal 30 Mei 2020.
- Bappenas Official Website. 1 Mei 2020. *Menteri Suharso Tegaskan Komitmen Bappenas Realokasi Anggaran IKN 2020 untuk Percepat Pemulihan Sosial-Ekonomi Indonesia*. <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/menteri-suharso-tegaskan-komitmen-bappenas-realokasi-anggaran-ikn-2020-untuk-percepat-pemulihan-sosial-ekonomi-indonesia/>. Diakses pada tanggal 30 Mei 2020.
- Bappenas Official Website. 10 Mei 2020. *Menteri Suharso Jabarkan Strategi Bappenas untuk Percepatan Pembangunan 62 Daerah Tertinggal*. <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/menteri-suharso-jabarkan-strategi-bappenas-untuk-percepatan-pembangunan-62-daerah-tertinggal/>. Diakses pada tanggal 30 Mei 2020.

Muhyiddin

- Bappenas Official Website. 29 Mei 2020. *Terapkan Protokol Masyarakat Produktif Dan Aman Covid-19, Bappenas Dorong Contactless Dan Cashless Society*, <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/terapkan-protokol-masyarakat-produktif-dan-aman-covid-19-bappenas-dorong-contactless-dan-cashless-society/>. Diakses pada tanggal 30 Mei 2020.
- Kompas Online. 18 April 2020. *Indonesia Diproyeksikan Tumbuh 0,5 Persen Tahun Ini*. <https://kompas.id/baca/ekonomi/2020/04/18/Indonesia-diproyeksikan-tumbuh-05-persen-tahun-ini/>. Diakses pada tanggal 30 Mei 2020.
- Kompas Online. 20 April 2020. *Triwulan II-2020, Titik Kritis Dampak Covid-19*. <https://kompas.id/baca/ekonomi/2020/04/20/triwulan-ii-2020-titik-kritis-dampak-covid-19/>. Diakses pada tanggal 30 Mei 2020.
- Kompas Online. 26 Mei 2020. *Mulai 1 Juni, Ini Skenario Tahapan New Normal untuk Pemulihan Ekonomi*, <https://money.kompas.com/read/2020/05/26/073708726/Mulai-1-juni-ini-skenario-tahapan-new-normal-untuk-pemulihan-ekonomi?page=all>. Diakses pada tanggal 30 Mei 2020.
- Kompas Online. 27 Mei 2020. *Indonesia Menuju New Normal Corona, Ini Protokol Kesehatan Covid-19 yang Harus Dilakukan*. <https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/27/163200923/indonesia-menuju-new-normal-corona-ini-protokol-kesehatan-covid-19-yang>. Diakses pada tanggal 30 Mei 2020.
- Liputan 6. 14 Februari 2020. *Jokowi Teken Perpres RPJMN 2020-2024, Ini Rinciannya*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4178653/jokowi-teken-perpres-rpjmn-2020-2024-ini-rinciannya>. Diakses pada tanggal 30 Mei 2020.
- Tempo Online. 1 April 2020. *Jokowi Terbitkan Perpu, Defisit Anggaran Boleh Lampau 3 Persen*. <https://bisnis.tempo.co/read/1326360/jokowi-terbitkan-perpu-defisit-anggaran-boleh-lampau-3-persen/full&view=ok>. Diakses pada tanggal 30 Mei 2020.
- Tirto Online. 5 April 2020. *Apa Itu PSBB Versi Pemerintah dan Kemenkes RI?* <https://tirto.id/apa-itu-psbb-versi-pemerintah-dan-kemenkes-ri-eK7v>. Diakses pada tanggal 30 Mei 2020.